

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soejono, Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2009, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Huda, Ni'Matul, 2007, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta.
- Sunny, Ismail, 1983, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta.
- Farida Indarti, Maria, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Rahayu, *et al.*, 2014, *Kinerja Regulator oleh Penyiaran Indonesia : Penilaian atas Derajat Demokrasi, Profesionalitas, dan Tata Kelola*, PR2M, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Triwulan, Titik, 2007, *Eksistensi Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Ashiddiqie, Jimly, *et al.*, 2006, *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Cet.ke-2, Sekretariat jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Hakim, Lukman, 2010, *Parameter untuk Melembagakan Komisi Negara sebagai Lembaga Negara*, In Trans, Malang.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hanjito, Ronny, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Arifin, Firmansyah, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KHRN), Jakarta.

Ross, Alf, 2004, *On Law and Justice*, The Law Book Exchange, LTD, New Jersey.

Y. Sri Pujiastuti, *et al.*, 2006, *IPS Terpadu*, Erlangga, Jakarta.

Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta.

Asimov, Michael.R, 2002, *Administrative Law*, The BarBri Group, Chicago.

### Internet

KPI, "Lihat Sanksi", <http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-sanksi>, diakses pada 9 Agustus 2016.

Parluten, Wurry, "Perbedaan Sensor dan Komisi Penyiaran", <http://www.frame-magz.com/2013/12/perbedaan-sensor-dan-komisi-penyiaran.html>, diakses pada 8 September 2016.

Kurniawan, Aris, "Pengertian Lembaga Negara Indonesia Serta Lembaga Berdasarkan Hirarki", <http://www.gurupendidikan.com/pengertian-lembaga-negara-indonesia-serta-lembaga-berdasarkanhirarki/>, diakses pada 22 Agustus 2016.

Katharina dan Poltak Partogi Naiggolan, "Pengawasan Peradilan oleh StateAuxiliaryInstitution", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15178/pengawasan-peradilan-oleh-Riris-istate-auxiliary-institutions>, diakses pada 9 September 2016.

Redaksi Penyiaran, "Perubahan UU Penyiaran Harus Memberikan Perlindungan Kepada Publik", <http://www.penyiaran.com/index.php/berita/bincang-penyiaran/39-m-z-al-faqih-perubahan-uupenyiaran-harus-memberikan-perlindungan-kepada-publik>, diakses pada 14 Juli 2016.

KPI, "Dasar Pembentukan", <http://www.kpi.go.id/index.php/2012-05-03-14-44-06/2012-05-03-14-44-38/dasar-pembentukan>, diakses pada 14 Juli 2016.

Akbar, Patrialis, "Dinamika Lembaga Negara Mandiri di Indonesia Pasca Perubahan Undang-undang Dasar 1945", <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/658-dinamika-lembaga-lembaga-negara-mandiri-di-indonesia-pasca-perubahan-undang-undang-dasar-1945.html>, diakses pada 23 Agustus 2016.

Dipa, Supama, “Film dan Lembaga Sensor Film”,  
<http://www.tamanfilm.com/2015/07/film-dan-lembaga-sensor-film-lsf.html>,  
diakses pada 10 Juni 2016.

Arya Wicaksono dan Lilis khalisotussur, “Lembaga Sensor Film Bentuk Perwakilan di Daerah”, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/778651-lembaga-sensor-film-bentuk-perwakilan-di-daerah>, diakses pada 23 Agustus 2016.

Karo, Rizki, “Analisis Yuridis terhadap Produk Hukum yang Dibuat Berdasarkan Kewenangan yang Bersifat Non Atributif”,  
[http://www.kompasiana.com/rizkykarokaro/analisis-yuridis-terhadap-produk-hukum-yangdibuat-berdasarkan-kewenangan-yangbersifat-nonatributif\\_55485e8c547b61d20b25254e](http://www.kompasiana.com/rizkykarokaro/analisis-yuridis-terhadap-produk-hukum-yangdibuat-berdasarkan-kewenangan-yangbersifat-nonatributif_55485e8c547b61d20b25254e), diakses pada 27 Agustus 2016.

Redaksi Hukum Online, “Kapan dan Bagaimana Hakim Melakukan Penemuan Hukum”,  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0aa8449485b/kapan-dan-bagaimana-hakim-melakukan-penemuan-hukum->, di akses pada 22 Agustus 2016.

Asshiddiqie, Jimly, “Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945”,  
[http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1665](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1665), diakses pada 19 Oktober 2016.

LSF, “Sejarah Lembaga Sensor Film”, <http://lsf.go.id/sejarahsensor>, diakses pada 10 Juni 2016.

### **Penelitian, Artikel, Makalah, dan Jurnal**

Azhary, 2004, *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*, Penelitian, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta.

Utama, Abraham, 2013, *Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Sensor Film Dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ashidiqqie, Jimly, 2008, “Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945”, *Makalah disampaikan pada Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I Angkatan XVII Lembaga Administrasi Negara*, Jakarta, 30 Oktober 2008.

Sultoni, Mohd, 2014, *Implikasi kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Arifin Mochtar, Zaenal, 2012, *Penataan Lembaga Negara Independen Setelah Perubahan Undang- Undang Dasar 1945*, Disertasi, Program Doktor  
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5060).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Penyiaran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3701).

Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515.)

Peraturan Nomor. 02 P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

Peraturan Nomor. 01 P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.